

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sebuah fenomena yang terus berkembang dalam kalangan masyarakat. Pajak merupakan usaha yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan kemandirian dalam diri bangsa dan negara terkait pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dalam berbagai sektor, hal ini karena sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar.²

Sumber pendapatan negara meliputi dua aspek yaitu dana yang diperoleh dari dalam negeri dan juga dana yang diperoleh dari luar negeri. Sumber dana yang diperoleh dari luar negeri meliputi bea masuk, pajak atas impor, hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri. Sedangkan, penjualan migas dan non migas serta pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang paling tinggi dan potensial adalah sumber dana yang diperoleh dari dalam negeri.³ Sumber penerimaan negara yang paling potensial berasal dari hasil pajak. Hasil dari pajak akan dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pendapatan

² Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyani Sudaryanti, “*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Vol. 10 No. 6, 2021

³ Teguh Erawati dan Gloria Maindo Mau Pelu, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E- Filling dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12 No. 3, 2021

yang didapat dari hasil pajak merupakan “motor penggerak” atau roda ekonomi bagi masyarakat yang bisa menyediakan berbagai sarana dan prasarana.⁴ Pajak adalah sebuah aspek terpenting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa.⁵

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana ataupun anggaran yang sudah ada agar nantinya proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya proses pembangunan nasional yang memerlukan banyak biaya, maka penerimaan negara perlu ditingkatkan.⁶

Pembangunan nasional dapat berhasil apabila dalam kegiatannya melibatkan partisipasi seluruh masyarakat di sebuah negara. Pajak harus dipungut tanpa membebani masyarakat dan juga harus adil dalam pelaksanaan dan pemungutannya.⁷ Pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan juga berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁴ Erlindawati dan Rika Novianti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 9 No. 1, 2020

⁵ Rita J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, 2020

⁶ Anak Agung Gde Mantra Suarjana, dkk., “Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, Vol. 16 No. 2, 2020

⁷ Erlindawati dan Rika Novianti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, .(2020)

merupakan pengertian dari pembangunan nasional. Jika sumber dana memadai dan cukup, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.⁸

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dibayarkan dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan bertambah pula penerimaan pajak dalam sektor pajak. Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan suatu daerah, untuk itu diperlukan adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya yang bisa meningkatkan jumlah pendapatan dalam sektor pajak.⁹

Peran pajak di dalam sebuah negara bisa dikatakan sebagai basis material bagi negara itu sendiri. Dalam sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara otoriter ataupun demokrasi yang dapat bertahan hidup dan juga menjalankan roda kekuasaan tanpa adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat, sehingga dapat diteorikan apabila basis material berjalan dengan lancar dan sangat baik dari segi penganggaran ataupun pembelanjannya, maka dapat terciptanya negara yang sejahtera. Pendapatan negara sudah banyak yang

⁸ I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, dan I Made Sudiartana, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*”, Jurnal Kharisma, Vol. 3 No. 1, 2021

⁹ Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dcriyani, “*Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar*”, Jurnal Kharisma, Vol. 3 No. 1, 2021

dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara, mulai dari pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-usaha negara. Namun, sektor-sektor tersebut masih belum dapat membawa negara ke dalam jenjang yang lebih baik lagi seperti apa yang diharapkan.¹⁰

Adanya peran besar pajak terhadap penerimaan negara, pemerintah diharuskan memaksimalkan pendapatan pajak dengan cara memberlakukan sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi pajak pada tahun 1983 sebagai pengganti sistem pemungutan pajak sebelumnya yaitu *official assessment system*.¹¹ Kepatuhan wajib pajak dapat berdampak kepada wajib pajak lainnya, sehingga terbentuk motivasi bagi wajib pajak yang lain dalam membayar pajak karena adanya faktor perilaku yang digunakan sebagai contoh.¹²

Diperlukan adanya sebuah motivasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Motivasi ini sangat perlu guna mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi terkait pengetahuan pajak sangat perlu dilakukan agar wajib pajak tahu seberapa penting pajak bagi kesejahteraan masyarakat.¹³ Motivasi adalah salah satu faktor penting yang wajib dimiliki oleh individu agar individu tersebut tergerak untuk melakukan aktifitas (membayar pajaknya), sehingga tujuan perpajakan nantinya dapat dicapai.¹⁴

¹⁰ Nilam Puspa Palupi Alisia Putri, *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2022)

¹¹ *Ibid.*

¹² Anak Agung Gde Mantra Suarjana, dkk., “*Pengaruh Kualitas dan Kepuasan, ...*(2020)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyani Sudaryanti, “*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, ...*(2021)

Banyak wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam menyelesaikan masalah perpajakan agar para wajib pajak dapat berkonsentrasi terhadap usaha atau pekerjaannya. Dengan ini, dapat menunjukkan bahwasannya motivasi yang kuat dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.¹⁵

Pengetahuan terkait perpajakan merupakan sebuah proses yang dimana seorang wajib pajak mengetahui dan dapat memahami terkait tata cara perpajakan dan juga kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan salah satu kontribusi dari warga negara terhadap negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, semakin luas pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi motivasi orang tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.¹⁶

Tingkat Pendidikan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi wajib pajak dapat berfikir bahwasannya pajak memang penting demi kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan menimbulkan motivasi dari dalam diri wajib pajak untuk sukarela membayar pajak.¹⁷ Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan juga berjenjang yang memiliki

¹⁵ Anak Agung Gde Mantra Suarjana, dkk., *“Pengaruh Kualitas dan Kepuasan, ...”(2020)*

¹⁶ Teguh Erawati dan Gloria Maindo Mau Pelu, *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, ...”(2021)*

¹⁷ Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyani Sudaryanti, *“Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, ...”(2021)*

tujuan agar menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang dapat memberikan manfaat sekaligus meningkatkan harkat dan juga martabatnya.¹⁸

Kesadaran akan membayar pajak merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh wajib pajak.¹⁹ Kesadaran wajib pajak merupakan contoh faktor internal yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak ketika membayar pajak. Menumbuhkan kesadaran akan perpajakan bagi sebagian orang memang tidaklah mudah. Sebagai contoh yaitu wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak.²⁰ Salah satu cara untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar pajak yaitu dengan memberikan sanksi pajak.²¹ Sanksi pajak sendiri dibuat untuk dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi pajak merupakan sebuah alat untuk mencegah wajib pajak untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dengan adanya sanksi pajak akan menyebabkan efek jera bagi para wajib pajak yang sering melanggar kewajiban perpajakannya. Berikut merupakan tabel perbandingan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

¹⁸ Susi Diana Wati, *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hlm. 42

¹⁹ I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, dan I Made Sudiartana, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, ...*”(2021)

²⁰ Kadek Vanny Panji Putra dan Edy Sujana, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng*”, *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 12 No. 1, 2021

²¹ I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, dan I Made Sudiartana, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, ...*”(2021)

Tabel 1.1
Data Perbandingan Jumlah Penduduk Desa se-Kecamatan Ngantru²²

Desa	Persentase
Pakel	5,816%
Pucung Lor	6,970%
Srikaton	9,222%
Padangan	12,115%
Pinggirsari	9,116%
Bendosari	9,131%
Ngantru	7,650%
Pulerejo	5,459%
Pojoy	11,246%
Kepuhrejo	7,941%
Mojoagung	3,507%
Batokan	4,447%
Banjarsari	7,374%
TOTAL	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan data di atas, bahwasannya Desa Padangan memiliki presentase jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 12,115% dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Ngantru sebesar 59.421. Desa Padangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistika, Desa Padangan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa lain di Kecamatan Ngantru.

Jumlah penduduk Desa Padangan atau wajib pajak yang mendominasi pada wilayah Kecamatan Ngantru ini pastinya akan sangat mempengaruhi jika persentase dari Desa Padangan tinggi ataupun rendah. Jika wajib pajak taat dalam membayar pajak, maka pendapatan pajak juga akan meningkat.

²² Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru dalam Angka Tahun 2023

Begitupun sebaliknya, jika wajib pajak lalai atau tidak taat dalam membayarkan pajaknya maka pendapatan pajak tidak akan mencapai target.

Pengetahuan, pendidikan, sanksi pajak, dan motivasi saling berkaitan dalam praktiknya, yang mana dalam memperoleh pengetahuan harus mendapatkan pendidikan yang didukung oleh suatu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Juga dengan adanya sanksi pajak yang diberikan, akan membuat seseorang termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Keterkaitan lainnya yaitu, hubungan sebab akibat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin luas pengetahuan yang didapat, sehingga tingkat kesadaran dan juga motivasi pada diri individu juga semakin besar.

Hubungan langsung antara variabel dependen dan variabel independen ada kemungkinan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam penelitian ini variabel pertama yang bertindak sebagai variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X_1), terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Motivasi dalam membayar pajak (Y). Variabel independen kedua, yaitu Tingkat Pendidikan (X_2), terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Motivasi dalam membayar pajak (Y). Variabel independen ketiga, yaitu Sanksi Pajak (X_3), juga terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Motivasi dalam membayar pajak (Y).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Erlindawati dan Rika Novianti.²³ Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, peneliti mengganti

²³ Erlindawati dan Rika Novianti, "*Pengaruh Tingkat Pendidikan, ...*(2020)

variabel dependen menjadi pengetahuan pajak dan sanksi pajak, dan objek pajak langsung pada masyarakat di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Uji analisis data menggunakan uji yang sama yaitu uji regresi linier berganda. Untuk metode pengambilan sampel yang digunakan juga sama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Erlindawati dan Rika Novianti menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini juga menggunakan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan penelitian-penelitian terdahulu dengan mempertimbangkan perbedaan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X), serta lokasi penelitian, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pajak
2. Banyak masyarakat yang pendidikannya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar
3. Kurangnya kesadaran akan sanksi pajak yang diberikan apabila telat dalam membayarkan pajaknya

4. Kurangnya motivasi dalam diri wajib pajak untuk turut berperan serta dalam pembiayaan pembangunan nasional

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah yang diuraikan. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)?
4. Apakah pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk meneliti apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk meneliti apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk meneliti apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk meneliti apakah pengetahuan pajak, tingkat Pendidikan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan apakah adanya pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap motivasi seseorang dalam membayarkan pajaknya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa bermanfaat, sebagai sumber informasi serta dapat berguna tentang motivasi dalam membayar pajak, serta dapat mendorong motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademik

Diharapkan, dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan pustaka dan penelitian ini bisa dijadikan referensi serta pembelajaran baru bagi perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi atau subjek penelitian selanjutnya dengan menggunakan topik serupa, dan juga dapat memberikan tambahan informasi kepada pembaca.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung
- b. Koresponden bertempat tinggal di Desa Padangan Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung

- c. Besar pengaruh motivasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya berkaitan tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Warga Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)”. Motivasi ini dipilih karena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka diperlukan adanya sebuah motivasi dari dalam diri wajib pajak agar nantinya wajib pajak taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan penelitian ini, diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan. Sehingga, perlu diuraikan dahulu tentang istilah dalam judul pada penelitian ini:

a. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan akan dipergunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.²⁴

b. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan baik soal tarif pajak sesuai undang-undang ataupun manfaat membayar pajak bagi individu.²⁵

c. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah kekuatan yang memiliki wewenang yang cukup kuat untuk individu, bagi rakyat banyak demi mewujudkan bagaimana dunia yang kita inginkan dan bagaimana untuk mencapai dunia itu. Tidak ada suatu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses Pendidikan.²⁶

d. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu alat sebagai pencegah (*preventif*) agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma akan perpajakan.²⁷

e. Pengertian Motivasi²⁸

²⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009* (<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>)

²⁵ Safri Nurmantu, "Pengantar Perpajakan; edisi 3", (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 7

²⁶ Muhammad Anwar, "Filsafat Pendidikan Edisi Pertama", (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 123

²⁷ Safri Nurmantu, "Pengantar Perpajakan,...hlm. 10

²⁸ Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyani Sudaryanti, "*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, ...*(2021)

Motivasi merupakan sikap atau nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang sesuai dengan tujuan individu tersebut. Sikap ataupun nilai adalah suatu hal yang *invisible* dan memberikan kekuatan atau mendorong individu untuk bertindak laku.²⁹

f. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Objek dari pajak kendaraan bermotor merupakan penguasaan kendaraan atau kepemilikan kendaraan bermotor.³⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terjadi pada masyarakat Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

²⁹ Bambang Sunatar, "Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Dosen Pada Perguruan Tinggi", (Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 20

³⁰ Liberti, dkk., "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari preferensi risiko hingga dampak), (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2023), hlm. 11

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dari penulisan skripsi. Landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini antara lain tentang pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan motivasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan pembahasan hasil dari setiap hipotesis dan juga jawaban rumusan masalah, di bab lima dijawab secara detail rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan pembahasan pada hasil penelitian dan saran untuk pemanfaatan hasil yang telah diteliti.